

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna. Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km² dengan 96% berupa lautan dan 4% berupa daratan. Kepulauan dan perairan memperlihatkan kebutuhan sarana perhubungan dan transportasi, untuk membangun komunikasi guna menjalin dan mengembangkan interaksi masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam membangun jaringan dan jalinan tersebut maka peranan angkutan laut atau pelayaran menjadi penting (Indrawasih, 2018).

Pelayaran merupakan sarana yang menghubungkan dari satu pulau dan pulau lainnya. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan atau transportasi di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Oleh karena itu, angkutan atau transportasi perairan meliputi kegiatan mengangkut, memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Jenis transportasi di perairan meliputi transportasi laut, sungai dan danau, serta transportasi penyeberangan. Adapun transportasi Laut dirinci menjadi transportasi dalam negeri, luar negeri, dan khusus (Indrawasih, 2018).

Sarana transportasi laut senantiasa wajib mengutamakan persoalan keselamatan dan keamanan, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek biaya yang terjangkau, kecepatan, dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam, terbakar, dan lain-lainnya

adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Untuk pelaksanaan peningkatan keselamatan pelayaran tersebut, Direktorat Jendral Perhubungan Laut telah mengeluarkan kebijakan dalam pencegahan kecelakaan kapal mengenai peningkatan pengawasan keselamatan pelayaran bagi kapal penumpang, membuat maklumat mengenai kondisi cuaca perairan di Indonesia seperti telegram perihal kesiapan cuaca buruk di Laut (Direktorat Jendral Perhubungan Laut dikutip dalam Hendarawan, 2019).

Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting dalam segala aspek di dunia pelayaran. Aspek yang melekat pada keselamatan pelayaran meliputi karakteristik sikap, nilai, dan aktivitas mengenai pentingnya terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan atau transportasi di perairan dan kepelabuhanan.

Pelabuhan adalah tempat berlabuh transportasi laut, baik itu transportasi untuk keperluan angkutan manusia ataupun barang. Pelabuhan memiliki peran penting pada ranah angkutan atau transportasi laut. Pelabuhan adalah tempat kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar-muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi dan mengadakan perbaikan. Dengan kata lain, pelabuhan selain menjadi pusat transportasi laut juga menjadi penyokong sektor ekonomi daerah (Firmanto, 2017).

Dunia pelayaran selalu terdapat berbagai macam resiko di laut yang dapat terjadi dalam bentuk apapun dan dimanapun, contohnya kapal tenggelam karena tubrukan, cuaca buruk, barang muatan membusuk, rusak, hilang atau dicuri dan lain-lainnya. Peristiwa ini dapat mengakibatkan banyak korban jiwa, kehilangan harta, ataupun pencemaran lingkungan. Salah satu fenomena yang terjadi di Tanjungpinang “Kapal Feri Tanjungpinang-Batam Kandas, Penumpang Panik” kejadian ini dikarenakan ada kapal yang mengangkut pada kapal yang membawa penumpang dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut (“Okenews”, 2019). Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengecekan sebelum kapal meninggalkan Pelabuhan. Oleh karena itu, Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik di kota Tanjungpinang.

Menurut Peraturan Menteri 36 Tahun 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian kegiatan kepelabuhanan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan juga menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan menggali lebih lagi mengenai **“PERAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG DALAM UPAYA PENANGANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN DI TANJUNGPINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Selama Praktek Darat dan banyak materi yang di pelajari tentang Kesyahbandaran, maka penulis membuat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang guna menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran?
2. Kesiapan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terhadap kelaiklautan kapal dalam keselamatan pelayaran?
3. Hambatan yang dihadapi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dan bagaimana cara penanganannya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Suatu kegiatan yang baik dan terarah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan diperoleh. Demikian juga dalam penulisan karya tulis ini mempunyai tujuan yaitu untuk:

- a. Untuk mengetahui peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terhadap jasa angkutan laut dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.
- b. Untuk mengetahui kesiapan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang akan kelaiklautan kapal dalam keselamatan pelayaran.
- c. Untuk mengetahui cara penanganan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terhadap kecelakaan pelayaran.

2. Kegunaan Penulisan

Dari penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Kegunaan bagi Akademik
Bagi akademik hasil penulisan ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu Pendidikan dan pelatihan untuk agar menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja. Hasil penulisan ini juga dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas, mutu, dan Pendidikan di universitas maritim AMNI Semarang.
- b. Kegunaan bagi Penulis
 1. Penulis dapat memahami prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terhadap jasa angkutan laut dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

2. Penulis dapat memahami prosedur pembuatan sertifikat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang akan kelaiklautan kapal dalam keselamatan pelayaran.
 3. Penulis dapat mengatasi kendala yang dihadapi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terhadap kecelakaan pelayaran.
- c. Kegunaan bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Tanjungpinang
- Bagi kantor KSOP Tanjungpinang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang. Perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program kerja. Membantu dalam dunia edukatif menambah wawasan mengenai aplikasi-aplikasi secara langsung pada saat ini. Mendapatkan inspirasi untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program kerja.
- d. Kegunaan bagi Masyarakat
- Bagi masyarakat hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai masukan, untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sistem dan prosedur KSOP untuk meningkatkan keamanan keselamatan pelayaran dimana masyarakat berperan sebagai pengguna jasa angkutan laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan penulisan ini. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori mengenai Peran, Penanganan, Pelabuhan, Syahbandar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran, Kelaiklautan Kapal, Sertifikat, dan Koordinasi Syahbandar dengan Instansi Pemerintah.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Bab ini menjelaskan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Tempat Penelitian, dan Waktu Penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Pembahasan dan Hasil mengenai rumusan masalah yang terdapat pada karya tulis ini sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan praktek darat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan penulisan.